

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin. 1983. *“Bunga Rampai Hukum Pidana”*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *“Hukum dan Penelitian”*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Agus Digdo Nugroho., Firman Fauzi. 2021. *“Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dasar-Dasar Perumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Peraturan Kebijakan”*. Sulur Pustaka. Yogyakarta.
- Agus Digdo Nugroho. 2015. *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, FH Universitas Yarsi. Jakarta.
- Agus Digdo Nugroho, (et.al). 2022. *“Hukum Administrasi Kependudukan Elektronik ; Paradoks Perlindungan dan Pengakuan Status Pribadi serta Status Hukum terhadap Kontrol Kepatuhan Warga Negara di Era 5.0”*. Nasmedia, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *“Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Dani Elpah (et.al). 2016. *“Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang”*. Pustaka Tinta. Jakarta.
- Direktorat Sistem Perbendaharaan. 2017. *“Panduan Teknis Pejabat Pembuat Komitmen”*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI. Jakarta.:
- E. Utercht, 1986. *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*. Pustaka Tinta Mas . Surabaya.
- Febriyanto Ricart Rincap, Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran Yang Berat Terhadap HAM, Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015.

- Hatta Ali. 2016. *"Sambutan Seminar Nasional Ikatan Hakim Indonesia dalam Rangka HUT IKAHI ke-62 Tahun 2015"*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Herman Mannheim. 1996. *"Criminal Justice and Social Reconstruction"*. Oxford University Press. New York.
- Hotma Pardomuan Sibuea., Heryberthus Sukartono. 2009. *"Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta. Krakatauw Book.
- Ikbar Andi Endang (et.al). 2022. *"Usulan Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Tentang Pengenaan Uang Paksa Kepada Pejabat Pemerintahan Sebagai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara"*. Kencana. Jakarta.
- Muchsin. 2003. *"Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia"*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Indra Bastian. 2010. *"Akuntansi Sektor Publik, suatu pengantar (PSASP), Edisi 3"*. Erlangga. Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji. 2007. *"Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana"*. CV Diadit. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *"Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi"*. PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Koentjoro Purbopranoto. 1978. *"Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi (Edisi Cetak Ulang)"*. Alumni. Bandung.
- Leli Joko Suryono. 2014. *"Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia"*. LP3M UMY. Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 1997. *"Sistem Administrasi Negara RI"*. PT Toko Gunung Agung. Jakarta.

Lilik Mulyadi. 2023. *“Titik Singgung Mengadili Menyalahgunakan Kewenangan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dan Pengadilan Tata Usaha Negara”*. Kencana. Jakarta.

Marbun, Rocky. 2010. *Tanya Jawab seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Visimedia, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, *“Hukum Tata Usaha Peradilan Militer Indonesia”*. (Bandung: Pustaka, 2001).

Muchsin. 2003. *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Muhammad Djafar Saidi., Eka Merdekawati Djafar. 2021. *“Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik”*. Radja Grafindo Persada. Depok.

Muhammad Firdaus., TrI Susanto. 2023. *“Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level I”*. LKPP. Jakarta.

Muhammad Ulil Albab. Tanpa tahun. *“Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”*. Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Nugraha, S. (et.al). 2007. *“Hukum Administrasi Negara”*. CLGS Universitas Indonesia. Jakarta.

Paulus Effendi Lotulung. 1988. *“Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah”*. PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.

Paulus Effendi Lotulung. 1993. *“Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Rechtstaat Republik Indonesia, penyunting Selo Soenardjan, Hukum*

Ketatanegaraan Republik Indonesia: Teori, Tatanan, dan Terapan". PT.

Grasindo. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *"Penelitian Hukum Edisi Revisi"*. Kencana. Jakarta.

Philipus M Hadjon. 2007. *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah*

Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam

Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi

Negara". PT Bina Ilmu. Surabaya.

Philipus M. Hadjon. 2011. *"Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi"*.

Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Prajudi Atmosudirjo. 1977. *Masalah Organisasi Peradilan Administrasi Negara,*

Dalam Hasil Simposium Peradilan Tata Usaha Negara yang

diselenggarakan oleh BPHN". Bina Cipta. Bandung.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *"Kamus Bahasa Indonesia*

Edisi Ketiga". Balai Pustaka. Jakarta.

R. Perdana. 2013. *"Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Upaya Menghindari*

Kegagalan dalam Pelaksanaan Kontrak". LKPN. Jakarta.

R. Simanjuntak. 2011. *Teknik Penyusunan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing;

Jakarta.

R. Subekti. 1989. *"Hukum Perjanjian"*. Intermasa. Jakarta.

Reimon Wacks. 1995. *"Jurisprudence"*. Blackstones Press Limited. London.

Richo Andi Wibowo. 2021. *"Kontrak Pemerintah (Konsep, Ragam, Perkembangan*

Regulasi, dan Kajian Putusan". Kencana: Jakarta.

Richo Andi Wibowo. 2022. *"Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pengadaan*

Barang/Jasa Pemerintah". Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- Ridwan Khairandy. 2013. *"Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan"*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy. 2011. *"Pengantar Hukum Dagang Indonesia I"*. Gama Media Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro. 1978. *"Rancangan Undang Peradilan Administrasi"*. BPHN Jakarta.
- Sahya Anggara. 2016. *"Administrasi Keuangan Negara"*. Pusaka Setia. Bandung.
- Salim HS., Erlies Septiana Nurbani. 2014. *"Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Satya Arinanto., Ninuk Triyanti. 2011. *"Memahami Hukum Dari Kontruksi sampai implementasi"*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- SF Marbun. 2011. *"Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia."* FH UII Press. Yogyakarta.
- Sjachran Basah. 1985. *"Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia"*. PT Alumni. Bandung.
- Soerjono Soekanto., Sri Mamudi. 1985. *"Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)"*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soeknato. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Depok.
- Sugiyono. 2006. *"Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)"*. Alfabeta. Bandung.
- Suparno. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*. Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Theodorus M Tuanakotta. 2018. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Salemba Empat. Jakarta.

Van Wijk/Konijnenbelt. 1998. *Hoofdstukken van Administratief Recht*, (Uitgeverij

Lemma b.v. Utrecht. Culemborg.

W.F. Prins-R., Kosim Adisaputro. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi*

Negara. PT Pradnya Paramita. Jakarta.

Wahyu Herison Made, *Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengelolaan*

Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo, JKMP (Jurnal Kebijakan Dan

Manajemen Publik), 5 (1), Maret 2017.

Yulius. 2022. *Problematisasi Eksekusi terhadap Pejabat Tata Usaha Negara dan*

Diskursus Lembaga Eksekusi Negara. Aura Publishing. Lampung.

Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Literatur Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie,

(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah

Tangga.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang

Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara

Nasional Indonesia

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember

2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

Literatur Online:

<https://inspektorat.jogjaprov.go.id/about/>

<https://www.kompas.id/baca/opini/2024/11/10/unsur-melawan-hukum-dan-merugikan-keuangan-negara>